**ABSTRAK**

 Sejalan dengan konsep clean government, maka pengelolaan barang milik negara dan daerah perlu diarahkan kepada fungsi kebermanfaatan bagi publik semaksimal mungkin. Pengelolaan aset/barang milik daerah harus ditangani dengan baik agar aset dapat dijadikan modal awal pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Sistem Informasi Pengelolaan Pelaporan Aset Terpadu (SIPPAT) merupakan aplikasi yang telah dirancang dan diperbaharui dalam rangka mendukung tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah secara integrasi melalui penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya.

 Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul “**Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pelaporan Aset Terpadu (SIPPAT) Dalam Penertiban Administrasi Barang Milik Daerah Di Badan Keuangan Daerah Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan**”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan SIPPAT berikut kendala dan upaya yang telah dilakukan BKD dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menitikberatkan pada metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

 Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan SIPPAT telah berjalan dengan cukup baik, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya Sumber Daya Manusia, kurangnya jaringan koneksi internet dan kesadaran setiap SKPD dalam pelaporan data aset. Sedangkan upaya yang dilakukan BKD untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penambahan jadwal pelatihan bimbingan teknis, pemenuhan fasilitas penunjang karena masih menggunakan sistem manual dan penanaman kesadaran aparatur pemerintah SKPD tentang ketetapan waktu dalam penyampaian informasi data aset kepada BKD dari setiap SKPD.

***ABSTRACT***

*Regarding to the concept of clean government, the management of commodities owned by state and local should be directed to the function of utilization for the public as much as possible. The management of the assets / commodities of the region can be used as the initial capital of local government to develop its financial capability.  Reporting Information of Integrated Asset Management System (RIIAMS/SIPPAT) is an application that has been reorganized and updated in order to support an orderly administration of local management of regional commodities through its budgeting, administration, accounting and reporting.*

*Based on that idea, the writer is interested to conduct a research entitled* ***"The Management of Reporting Information of Integrated Asset Management System (RIIAMS/SIPPAT) in controlling the administration of commodities belonging to the region in financial institution of Parepare, city of South Sulawesi”.*** *This study aims to find out how the management of RIIAMS/SIPPAT following the constraints and efforts that have been done by BKD in overcoming the obstacles encountered. This research uses qualitative research with the emphasis on descriptive method through inductive approach. The data collection is in the form of observation, interview and documentation. Meanwhile the data analysis is in the form of data reduction, data presentation and conclusion.*

*The results showed that RIIAMS/SIPPAT implementation has been running quite well, in the implementation, there are some obstacles such as human resources, lack of internet connection network and awareness of each SKPD in each reporting of asset data. While the efforts made by BKD to overcome this is through the addition of training schedule of technical guidance, fulfillment of supporting facilities because it still uses the manual system of cultivating awareness SKPD government apparatus about the timing in the delivery of asset data information to the BKD of each SKPD.*